

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 2005. *Format Anggaran terpadu menghilangkan tumpang tindih*. Bapekki Depkeu.
- Ardiyos, 2007. *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- Adi, Priyo Hari, 2005. “Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap PAD”. *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, 2006. “Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah vol.2*, Hal 17-32.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 2020. www.bps.go.id.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Darwanto, 2006. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan APBD, 28 November 2009, www.djpkpd.go.id.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 2004.
- Hadi, Syamsul, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan*, Cetakan Pertama, Ekonisia, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- _____. 2002. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Belanja Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marsyahrul, Tony, 2004. *Pajak Penghasilan*, Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya, 2016. “Internet Financial Reporting dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan

- Kabupaten di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol.3(2), 2016, pp 89-104.
- Rahman, Herlina, 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah angan Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah angan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.